

**PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS
ADMINISTRASI PUBLIK MELALUI SISTEM DAN
KEBIJAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI**

OLEH

Dr. H. ADJAT DARADJAT, M.Si

Disajikan dalam rangka :

**Seminar Nasional "Penguatan Administrasi Publik / Negara untuk
Kesejahteraan Rakyat ; Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik"
Pada Konferensi *Indonesian Association for Public Administration IV***

Tanggal 7 Juli 2011

PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS ADMINISTRASI PUBLIK MELALUI SISTEM DAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI

I. KERANGKA PEMIKIRAN

Indikator keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerimaan mahasiswa (*inputs*) serta jumlah lulusan (*output*) yang dihasilkan, yang lebih utama harus diukur dari tingkat penerimaan masyarakat pengguna dalam konteks lapangan kerja. Parameter tingkat penerimaan tersebut, secara obyektif senantiasa diukur dari tingkat kompetensi lulusan pendidikan, yang paling sedikit harus memenuhi 3 pilar kompetensi, yaitu : *knowledge – skill – Attitude*. Tingkat, keluasan dan karakteristik untuk setiap jenis keahlian akan ditentukan oleh masyarakat pengguna atau komunitas profesi, dengan menetapkan standar kompetensi kerja/profesi.

Oleh karena itu, kompetensi kerja/profesi adalah suatu bentuk pengakuan (*recognition*) dari masyarakat pengguna atau komunitas profesi, terhadap keahlian seseorang setelah melalui proses pengujian (*assesment*), berdasarkan standar kompetensi yang telah dibakukan.

Legitimasi dari pengakuan tersebut dituangkan secara tertulis dalam sebuah produk hukum yang bernama sertifikat kompetensi kerja/profesi. Ada 3 jenis sertifikat yang berkaitan dengan tingkat kemampuan seseorang :

a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (*Certificate of Attainment*)

Dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan, berlaku selamanya.

b. Sertifikat Lisensi/Registrasi Profesi (*Certificate of Proficiency*)

Dikeluarkan oleh organisasi profesi, berlaku untuk masa tertentu

c. Sertifikat Kompetensi Kerja/Profesi (*Certificate of Competension*)

Dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, berlaku untuk masa tertentu

Sertifikat kompetensi profesi diyakini sebagai alat yang tepat untuk menjembatani kesenjangan (*gap*) kebutuhan dan ketersediaan, antara dunia pendidikan dan pelatihan (*supply sector*) dengan dunia kerja (*demand sector*) dalam konteks pasar kerja.

II. FENOMENA FAKTUAL LULUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi publik sebagai sebuah ilmu sekaligus praktek, sangat diperlukan untuk menggerakkan organisasi publik, memberikan pelayanan publik, serta mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Banyak ragam keahlian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut, berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen publik kontemporer, seperti: keahlian dalam menyusun perencanaan pembangunan, perencanaan keuangan publik, perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia makro dan mikro, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang material publik, penyusunan kebijakan publik, ahli pengelolaan keuangan publik, ahli pengelolaan kepegawaian publik, ahli pengelolaan sumber daya material publik, ahli dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, ahli dalam analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan publik, dan sebagainya.

Kebutuhan pasar kerja publik seperti di atas belum mampu dipenuhi oleh lulusan ilmu administrasi publik. Hal tersebut karena belum terwujud keserasian dan kesepadanan (*link and match*) antara kurikulum dan silabus pendidikan yang digunakan oleh lembaga pendidikan ilmu administrasi publik, dengan standar kerja yang dibutuhkan oleh organisasi pengguna. Di satu sisi kurikulum dan silabus lebih bersifat rigid, dilain pihak kebutuhan pasar kerja cenderung sangat elastis mengikuti tuntutan perubahan dari masyarakat yang cenderung turbulen. Akibatnya lapangan pekerjaan administrasi publik menjadi multi entry dan bersifat terbuka. Dapat di isi dan dilaksanakan oleh orang-orang dari berbagai disiplin ilmu di luar ilmu administrasi publik, sehingga hasilnya menjadi tidak optimal, bahkan berisiko kegagalan. Sebagai contoh : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dijabat oleh seorang Dokter Gigi, Kepala Biro Keuangan dijabat oleh seorang lulusan fakultas teknik, hanya karena telah memenuhi syarat formal jabatan dan kepangkatan, dan sebagainya.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh jabatan-jabatan lain yang single entry dan tertutup. Pada disiplin ilmu hukum, orang tidak bisa sembarangan bisa menjadi hakim, jaksa, pengacara, penasehat hukum, arbiter dan sebagainya, apabila belum mengikuti pelatihan serta mengikuti ujian kompetensi dari asosiasi profesinya, misalnya PERADI, meskipun bagi seorang sarjana hukum sekalipun. Sama halnya bidang profesi lain, misalnya : Akuntan, konsultan pajak, financial planner, dokter, keahlian-keahlian di bidang jasa konstruksi, keahlian-keahlian di bidang jasa kesehatan, dan sebagainya. Akibatnya organisasi pengguna seperti pemerintah propinsi, kabupaten dan kota, bahkan di jajaran pemerintah pusat sekalipun, belum mampu mengidentifikasi kebutuhan jabatan yang spesifik pada saat rekrutmen pegawainya. Sehingga kualifikasi kebutuhan yang dicantumkan bukan keahliannya, tetapi jenis dan jenjang pendidikannya. Akibatnya tenaga yang direkrut merupakan barang mentah (*raw material*) dan tidak siap pakai.

III. SOLUSI YANG DIREKOMENDASIKAN

Memberdayakan organisasi profesi di bidang administrasi publik (PERSADI dan IAPA), untuk berfungsi sebagai basis komunitas dan pemegang otoritas kompetensi profesi di bidang administrasi publik. Langkah-langkah yang harus dilakukan :

1. Mendorong terselenggaranya pendidikan administrasi publik berbasis kompetensi, dengan rincian langkah kegiatan :
 - a) Pemetaan (*mapping*) jenis-jenis keahlian spesifik dari administrasi publik, sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan. Koordinasi dengan asosiasi-asosiasi pemerintah propinsi, kabupaten, kota, kementerian-kementerian, melalui koordinasi Lembaga Administrasi Negara (LAN), sebagai pemegang otoritas administrasi publik di Indonesia.
 - b) Menyusun standar kompetensi kerja/profesi untuk jenis-jenis keahlian tersebut, bekerja sama dengan unit-unit kerja seperti di atas, juga dengan koordinasi LAN.
 - c) Nota kesepahaman dengan Kemendiknas, bahwa standar kompetensi yang dibuat tidak mengurangi apalagi menghilangkan standar pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan di dalam program, kurikulum dan silabus secara baku. Standar kompetensi profesi merupakan program tambahan dengan muatan yang spesifik dan lebih bersifat praktis, sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja (pengguna).
 - d) Untuk standar kompetensi, selain bisa dibuat sendiri sebagai standar nasional, bisa juga dengan cara mengadopsi standar-standar internasional yang telah dibakukan oleh organisasi-organisasi profesi administrasi publik internasional. Misalnya untuk standar kompetensi perencanaan keuangan publik telah tersedia standar internasional dari lembaga administrasi publik di USA.
 - e) Standar-standar profesi yang telah dibakukan di atas, dapat diaplikasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan administrasi publik di Indonesia sebagai mata kuliah tambahan, sehingga menjadi bekal bagi para lulusan untuk mengikuti ujian kompetensi. Sehingga pada saat selesai pendidikan, para lulusan selain mendapat ijazah pendidikan (*certificate of attainment*) dari lembaga pendidikannya, juga mendapat sertifikat kompetensi profesi dari lembaga sertifikasi profesi.
 - f) Standar profesi tersebut juga dapat digunakan oleh para praktisi, agar mereka bisa mengikuti uji kompetensi, untuk meningkatkan profesionalismenya, dengan syarat pokok harus memiliki latar belakang

pendidikan ilmu administrasi publik. Dengan cara ini maka profesi di bidang administrasi publik menjadi *single entry* dengan sifat terbuka tapi terbatas.

2. Asosiasi Profesi Administrasi Publik membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi yang bersifat nasional, dengan mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sehingga sertifikasi yang dikeluarkannya berlaku secara nasional, serta memiliki legitimasi yang kuat dari lembaga pemegang otoritas kompetensi profesi di Indonesia.

Untuk itu perlu dilakukan langkah sebagai berikut :

- a) Membentuk panitia kerja pembentukan LSP Administrasi Publik.
- b) Melakukan konsultasi dengan BNSP untuk langkah-langkah pembentukan LSP.
- c) Menyiapkan persyaratan-persyaratan formal dan material yang dibutuhkan.
- d) Menyiapkan pelatihan bagi calon assesor kompetensi untuk dilatih dan di lisensi oleh BNSP.
- e) Menyiapkan Tempat Uji Kompetensi (*assesment centre*), pada berbagai daerah sesuai kebutuhan.

IV. EKSISTENSI DAN PERAN SDM DALAM PEMBANGUNAN SEMESTA

Pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*), merupakan keniscayaan dalam pembangunan bangsa dan negara. SDM merupakan faktor yang memiliki posisi sangat strategis dibandingkan faktor-faktor pembangunan lainnya, seperti : Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Kapital (SDK), serta Sumber Daya Buatan (SDB), karena manusia yang merencanakan, mengolah, menggunakan, menikmati, bahkan merusak atau menyalahgunakan ketiga faktor di atas.

Paradigma baru pengelolaan SDM adalah menempatkannya sebagai *human capital*, dibandingkan hanya sebagai salah satu faktor produksi yang bersifat pasif dan kurang produktif. SDM tidak boleh hanya digunakan sampai habis, tapi harus senantiasa dirawat dan dikembangkan. Semua pembiayaan bagi SDM jangan hanya dianggap sebagai *labour cost*, tetapi sebagai nilai investasi (*human investment*), yang akan menghasilkan nilai tambah berlipat ganda jika dikelola dengan baik dan benar. Stagnansi atau bahkan kegagalan pencapaian sasaran pembangunan dimanapun, lebih disebabkan kegagalan dalam memposisikan peran dan fungsi SDM secara tepat dan maksimal.

V. KONDISI AKTUAL PENGEMBANGAN SDM DI INDONESIA

Analisis Sistem Lingkungan (*Ecosystem Analysis*)

- Faktor Internal :

1. Gap supply and demand : Kuantitas – kualitas – distribusi teritorial
2. Produktivitas dan kualitas hasil kerja
3. Efektivitas dan efisiensi kerja
4. Rendahnya tingkat upah, kesejahteraan, jaminan sosial dan perlindungan kerja
5. Tingginya harapan industri dan masyarakat untuk mendapatkan kepastian : pelayanan, mutu, waktu, harga, distribusi, pelayanan purna jual.

- Faktor Eksternal :

Tantangan globalisasi dan perdagangan bebas, yang memiliki ciri-ciri :

1. Luas lingkup pasar kerja memiliki spektrum yang luas, melewati batas wilayah, negara, sektor usaha, lintas disiplin keilmuan.
2. Mengutamakan keunggulan SDM dibandingkan faktor-faktor lain.
3. Meningkatnya peran komunikasi.
4. Kebutuhan informasi pasar kerja yang luas dan akurat.
5. Pergeseran keunggulan komparatif ke keunggulan kompetitif.
6. Pergeseran paradigma tentang bekerja dan pola kerja, misal : out sourcing, flexiworking time, dsb.
7. Restrukturisasi organisasi, misal : mengurangi tingkatan jabatan, mengurangi fasilitas kerja, penggunaan teknologi, perampingan organisasi (merger, akuisisi, dsb), yang sasaran utamanya mengurangi jumlah tenaga kerja.
8. Deregulasi internasional, misal : *tarif reduction*, dsb.
9. Perjanjian-perjanjian Internasional maupun regional yang membuka sekat-sekat nasional, misal : AFTA, AFTA, dan lain-lain.

Keseluruhan fenomena di atas senantiasa mengarah pada :

Peningkatan kompetisi, mendorong kebutuhan SDM yang unggul, serta pengurangan tenaga kerja.

Pengelolaan pasar kerja di Indonesia yang menggunakan model-model :

1. Perencanaan tenaga kerja
2. Analisis jabatan
3. Informasi pasar kerja
4. Bursa kerja
5. Pengantar kerja, dsb.

Belum mampu menjembatani kesenjangan antara kondisi *supply side* yang terdiri dari :

1. Lulusan pendidikan dan latihan
2. Pencari kerja
3. Pekerja mandiri
4. Pekerja di industri

Dengan *demand side* yang terdiri dari : pengelola industri, konsumen dan masyarakat.

Kekurangmampuan lembaga pendidikan dan lembaga latihan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan menurut kebutuhan pasar kerja. Karena dinamika perubahan standar pelayanan yang cenderung turbulence sesuai tuntutan konsumen, sedangkan perubahan kurikulum pendidikan dan latihan berubah secara gradual.

Muncul konsep sertifikasi kompetensi profesi, dengan tujuan utamanya :

1. Menciptakan SDM unggul (*excelece people*) yang kompeten, yaitu orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang biasa, dengan cara yang berbeda, untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
2. Mampu menjembatani (*golden ways*) antara sisi supply dengan sisi demand, agar terjadi kesamaan frekuensi dan harmonisasi (*link and match*) diantara kedua sisi.
3. Mampu menutup kesenjangan antara dinamika standar pelayanan dengan sifat statis kurikulum pendidikan dan latihan.

Sistem sertifikasi kompetensi merupakan salah satu unsur dari konteks pengembangan sumber daya manusia (HRD), di samping unsur-unsur lainnya, yaitu : *training and development, career planning, dan performance appraisal.* (Stone, Raymond, 2005, 327).

FENOMENA PENGEMBANGAN SDM DI INDONESIA

Sistem Analisis Lingkungan (Ekosistem)

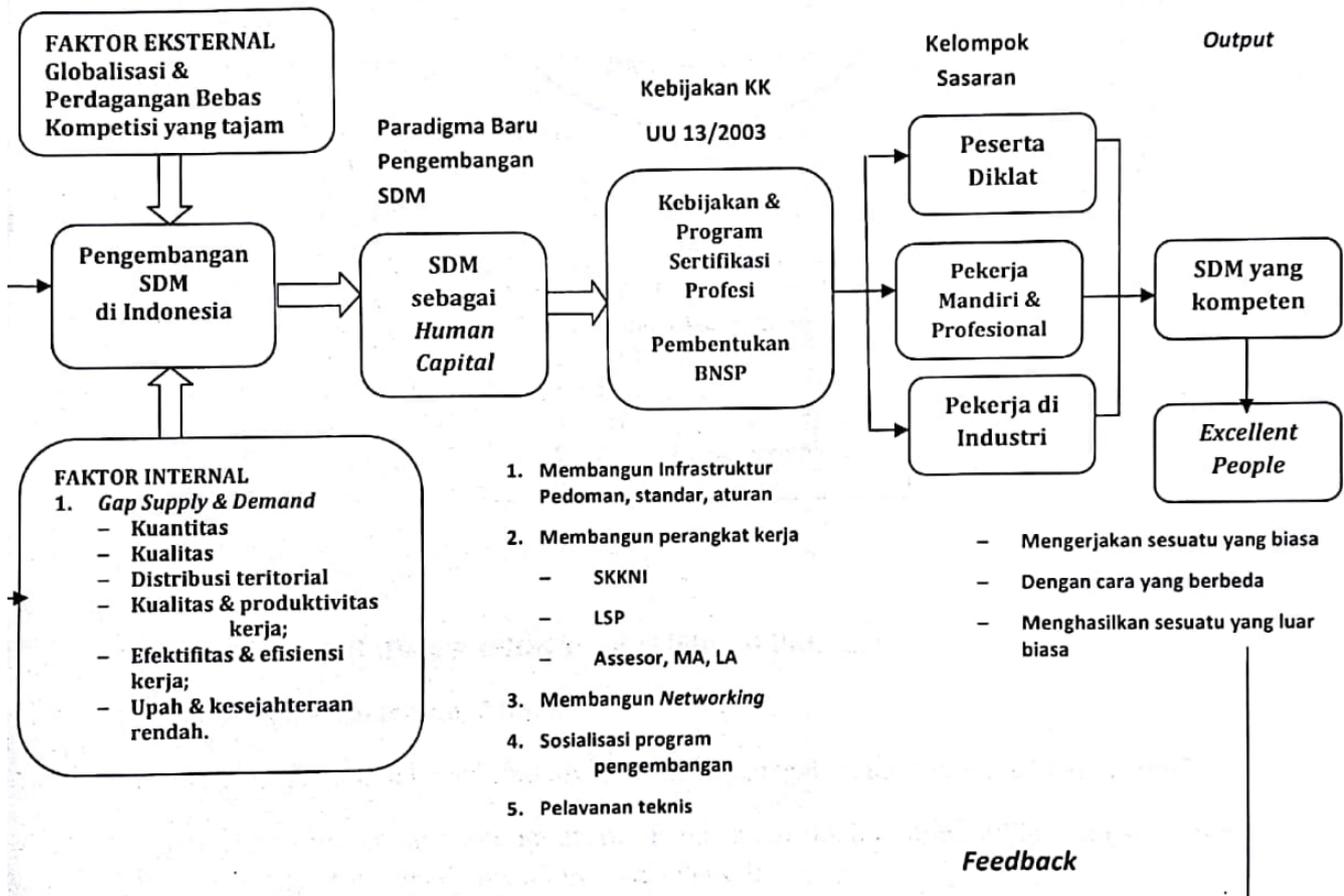
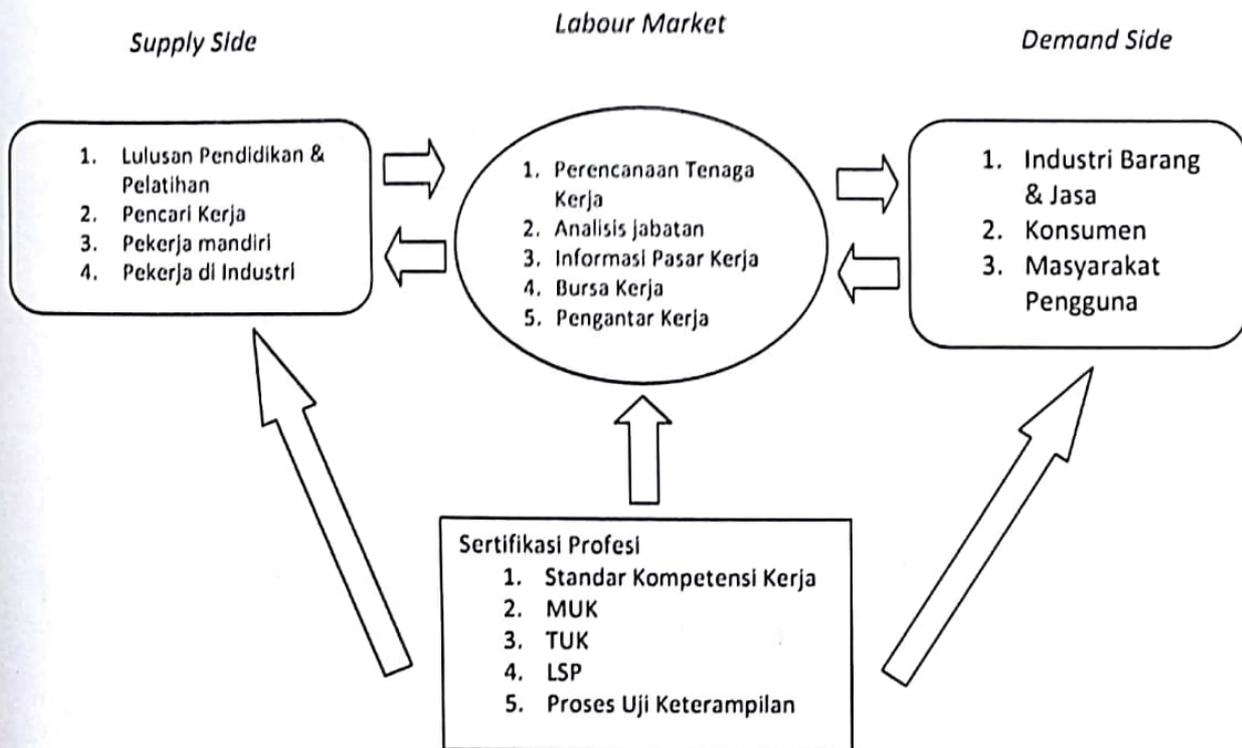


DIAGRAM ANALISIS PASAR KERJA



VI. EKSISTENSI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Beberapa karakter dari BNSP :

1. Sebagai amanah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
2. Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004, pengangkatan keanggotaannya dengan Keputusan Presiden
3. Merupakan **lembaga publik** yang bersifat **independen**, memiliki otoritas dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Memiliki fungsi :

- a) Melaksanakan uji kompetensi.
- b) Memberikan lisensi kepada LSP yang dinilai memenuhi persyaratan.
- c) Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar dan pedoman sertifikasi kompetensi.

- d) Memfasilitasi terwujudnya sistem sertifikasi kompetensi yang kredibel dan traceable.
- e) Membantu dalam rangka menyiapkan dan memelihara kompetensi tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing (*competitiveness*).
- f) Memfasilitasi kerja sama dengan institusi sejenis di berbagai negara, melalui *Mutual Recognition Agreement (MRA)*.

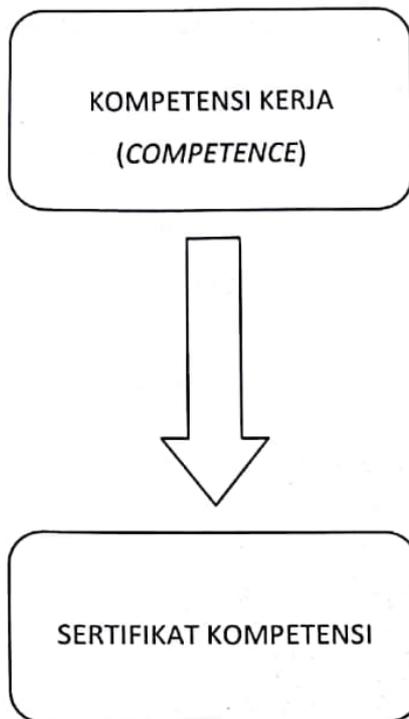
Latar Belakang Perlunya Sertifikasi Kompetensi :

Industri & Konsumen :

1. Memiliki otoritas dalam memilih penggunaan tenaga kerja
2. Menginginkan kepastian mutu
3. Menginginkan tenaga kerja yang kompeten
4. Berorientasi pada efisiensi dan efektivitas
5. Langkanya tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja

Prinsip Dasar Sertifikasi Kompetensi :

1. Berorientasi pasar kerja
2. Pengembangan SDM
3. Berbasis kompetensi
4. Tanggung jawab bersama
5. Pengembangan Profesi (Life Long Learning)
6. Adil dan tidak diskriminasi



Spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, ketrampilan dan atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Diungkapkan dalam bentuk:

- Pengakuan Langsung
- Produk Hukum (Ijazah, Sertifikat)

Bukti penguasaan tertulis atau produk hukum yang merupakan legitimasi dari pengakuan terhadap kemampuan seseorang pada bidang tertentu.

VII. JENIS - JENIS SERTIFIKAT

- (1) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (*Certificate of Attainment*)

Dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Berlaku selamanya).

- (2) Sertifikat Lisensi/Registrasi Profesi (*Certificate of Proficiency*)

Dikeluarkan oleh Organisasi Profesi (Berlaku untuk masa tertentu).

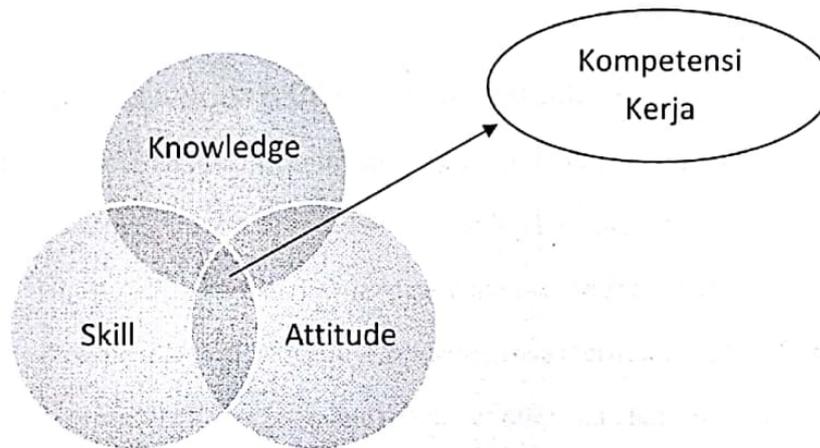
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja/Profesi

Diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (Berlaku untuk masa waktu tertentu)

Kompetensi kerja

Integrasi dari 3 (tiga) komponen:

- ⊙ *Knowledge* : *Know Why*
- ⊙ *Skill* : *Know How*
- ⊙ *Attitude* : *How Should*



Knowledge

1. Pendidikan formal yang sesuai dengan profesinya;
2. Pelatihan – pelatihan yang sesuai;
3. Pengetahuan hasil dari pengalaman kerja.

Skill

1. Keterampilan melaksanakan pekerjaan (*Task Skill*);
2. Keterampilan mengelola pekerjaan (*Management Skill*);
3. Keterampilan mengantisipasi kemungkinan (*Contingency Management Skill*);
4. Keterampilan mengelola lingkungan (*Job/Role Environment Skill*);
5. Keterampilan beradaptasi (*Transfer Skill*).

Attitude

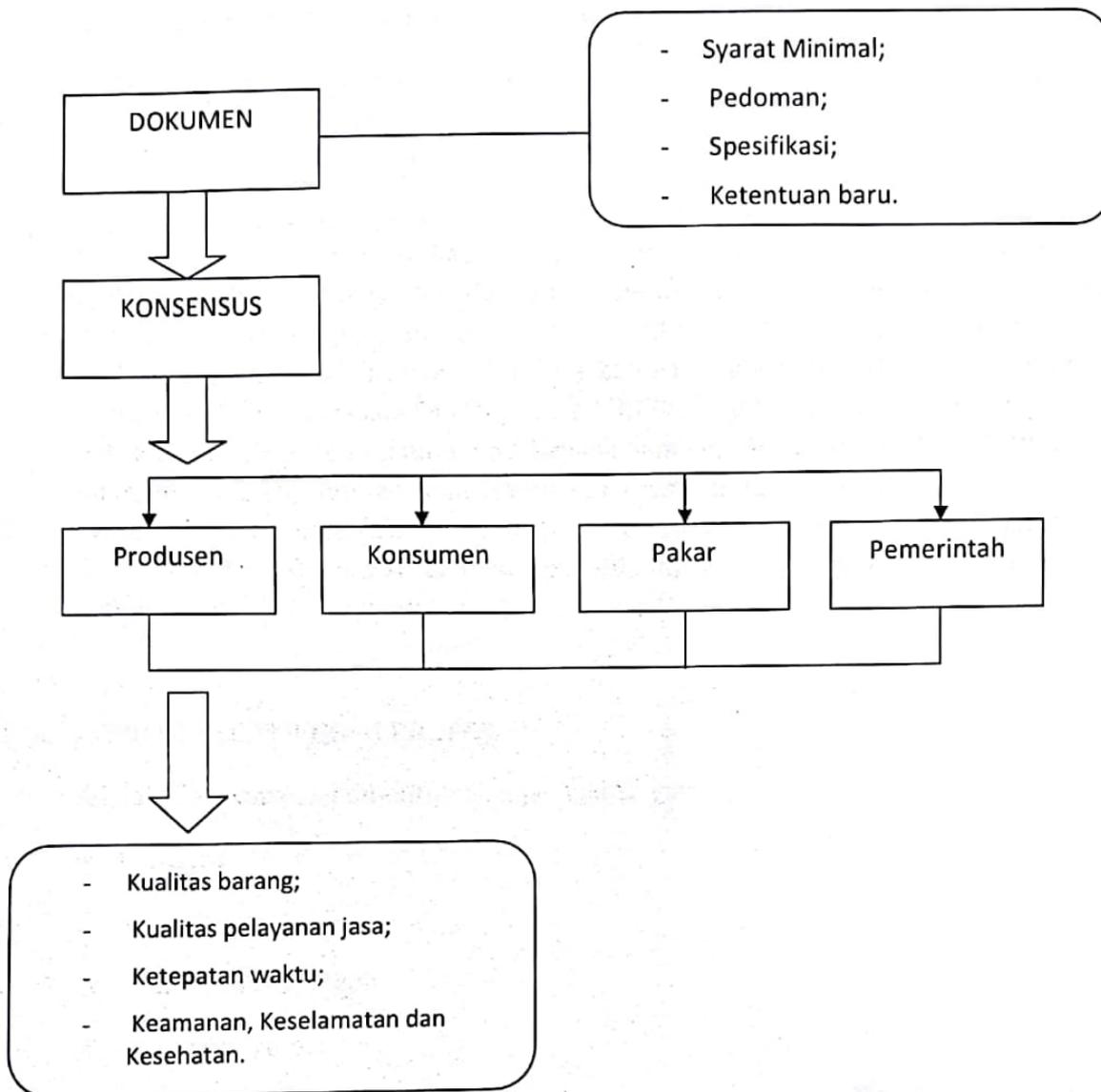
1. Performa selama bekerja;
2. Tanggapan lingkungan kerja;
3. Penghargaan;
4. Penilaian kliennya.

VIII. BEBERAPA KUALIFIKASI DARI SERTIFIKASI KOMPETENSI

- 1) Ditetapkan setelah melalui pengukuran/pengujian (*Assesment*)
 - *Objective* (Obyektif) → tidak ada konflik kepentingan
 - *Measurable* (*Terukur*) → menggunakan standar tertentu
 - *Treasurable* (Tertelusur) → seluruh proses terdokumentasi & terkendali
 - *Acceptable* (Keberterimaan) → dapat diterima oleh semua *stake holders*
 - *Accountable* → dapat dipertanggung jawabkan
2. Pengakuan dilakukan oleh industri pengguna dan masyarakat pengguna, melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang ditetapkan oleh BNSP.
3. Berkaitan dengan kompetensi terkini dari pencapaian masa lalu.
4. Berlaku untuk waktu tertentu pada tingkatan kemampuan tertentu dan jenis kemampuan tertentu. Membangun kompetensi dan memelihara kompetensi.

Untuk mengukur pencapaian kompetensi kerja, diperlukan standar kompetensi, yang merupakan kumpulan ukuran-ukuran hasil kesepakatan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja yang ingin mendapat pengakuan tentang kompetensi kerjanya.

Standar Kompetensi



IX. JENIS-JENIS STANDAR KOMPETENSI KERJA (PP 31/2006 tentang SISLATKERNAS)

1. Standar kompetensi khusus,
yaitu standar yang dibuat, ditetapkan dan digunakan secara khusus oleh dan untuk organisasi tertentu,
2. Standar kompetensi internasional,
yaitu standar yang dengan sengaja diadopsi dari standar internasional,

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),

Standar kerja yang dibuat dan diusulkan oleh sektor industri tertentu, mengenai kompetensi kerja pada keahlian tertentu yang ditetapkan dan disahkan untuk diberlakukan secara Nasional.

Untuk mengukur pencapaian standar kompetensi kerja, dilakukan uji kompetensi, yang menjadi kewenangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sebagai lembaga Negara yang memiliki otoritas sebagaimana diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dalam melaksanakan tugasnya, BNSP mendelegasikan kewenangannya untuk melaksanakan uji kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang dibentuk oleh komunitas yang merepresentasikan sektor industri dan asosiasi profesi tertentu, setelah memenuhi persyaratan teknis, persyaratan administrasi dan syarat kesisteman, serta mendapat dukungan dari kementerian teknis yang membawahi sektor tersebut.

X. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Adalah lembaga yang dibentuk oleh pengguna, yaitu :

- ⊙ Industri,
- ⊙ Masyarakat,
- ⊙ Lembaga Pendidikan,
- ⊙ Lembaga Profesi.

Bertugas melakukan pengukuran (*assesment*) terhadap para assesee, berdasarkan standar yang ditetapkan.

XI. JENIS - JENIS LSP

- LSP I (First Party)

Dibentuk pada satu organisasi industri atau lembaga pendidikan tertentu untuk memastikan kompetensi tenaga kerjanya sendiri atau lulusannya sendiri.

- LSP II (Second Party)

Dibentuk untuk mengases/memastikan kompetensi orang-orang dari pihak luar untuk kepentingan organisasinya.

- LSP III (Third Party)

Dibentuk oleh gabungan organisasi tertentu untuk mengases orang-orang di lingkungan sektornya.

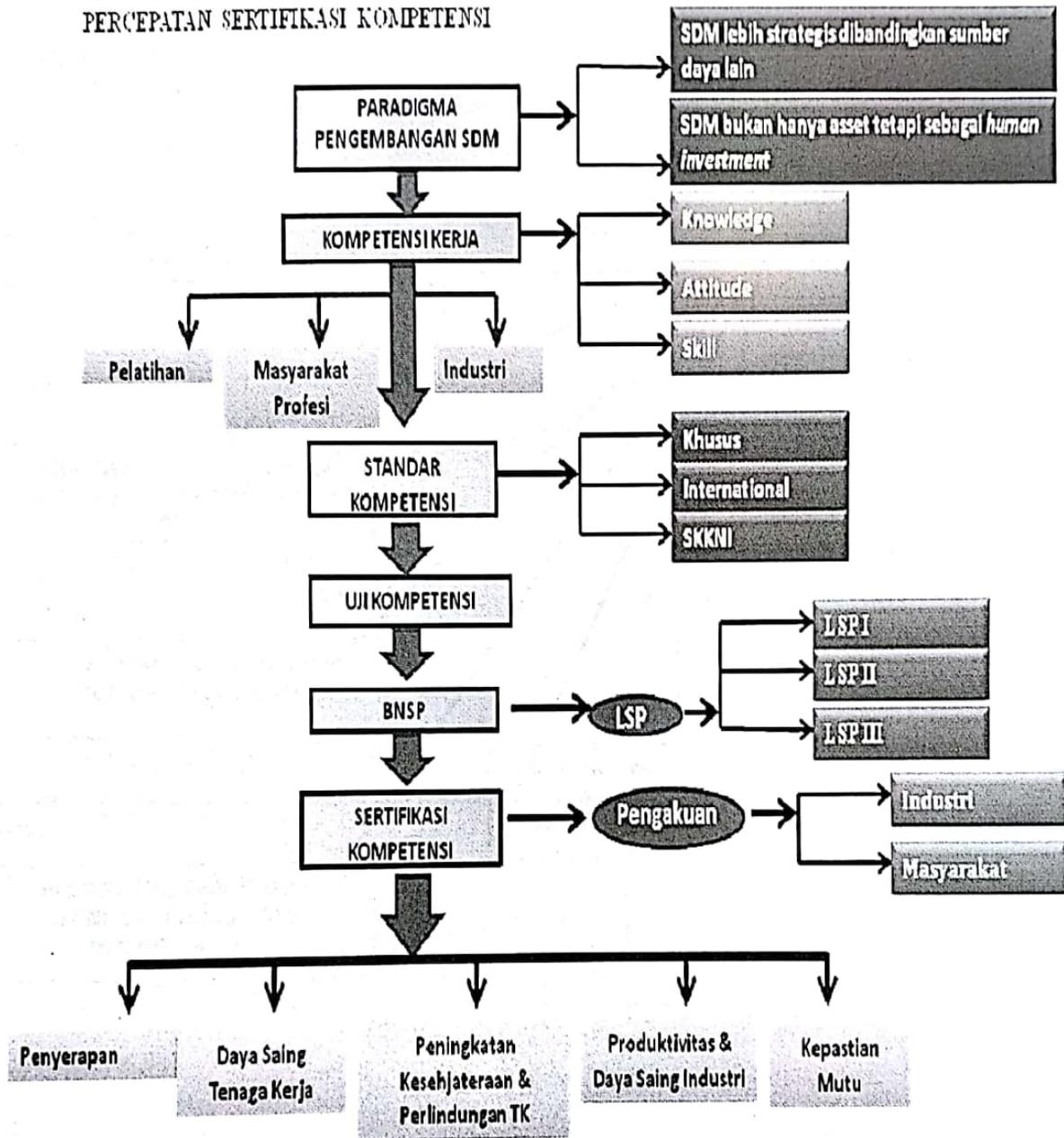
- LSP Profisiensi

Dimaksudkan sebagai alat uji keberterimaan asosiasi profesi dalam rangka status profesi.

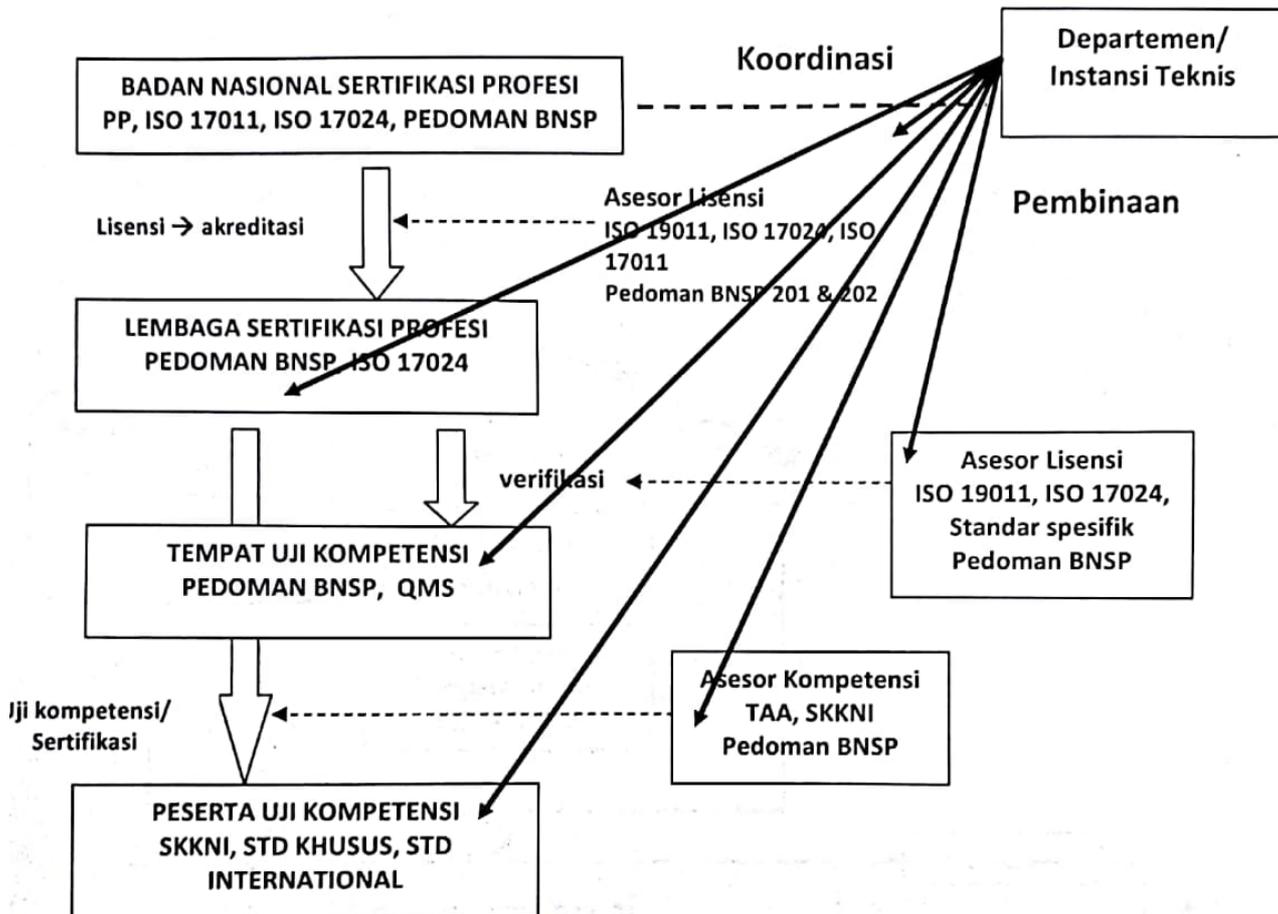
Setelah melalui proses pengujian yang ketat dan tertelusur, peserta uji kompetensi berhak mendapat sertifikat uji kompetensi, sebagai bukti pengakuan (*recognition*) dari masyarakat pengguna melalui skema BNSP, untuk jenis keahlian tertentu dan batas waktu tertentu. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan sistem setifikasi kerja, yaitu :

1. memperluas penyerapan kerja,
2. meningkatkan daya saing tenaga kerja dari kompetisi global,
3. meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing industri,
4. mendukung perlindungan kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja,
5. menjamin kepastian mutu produksi.

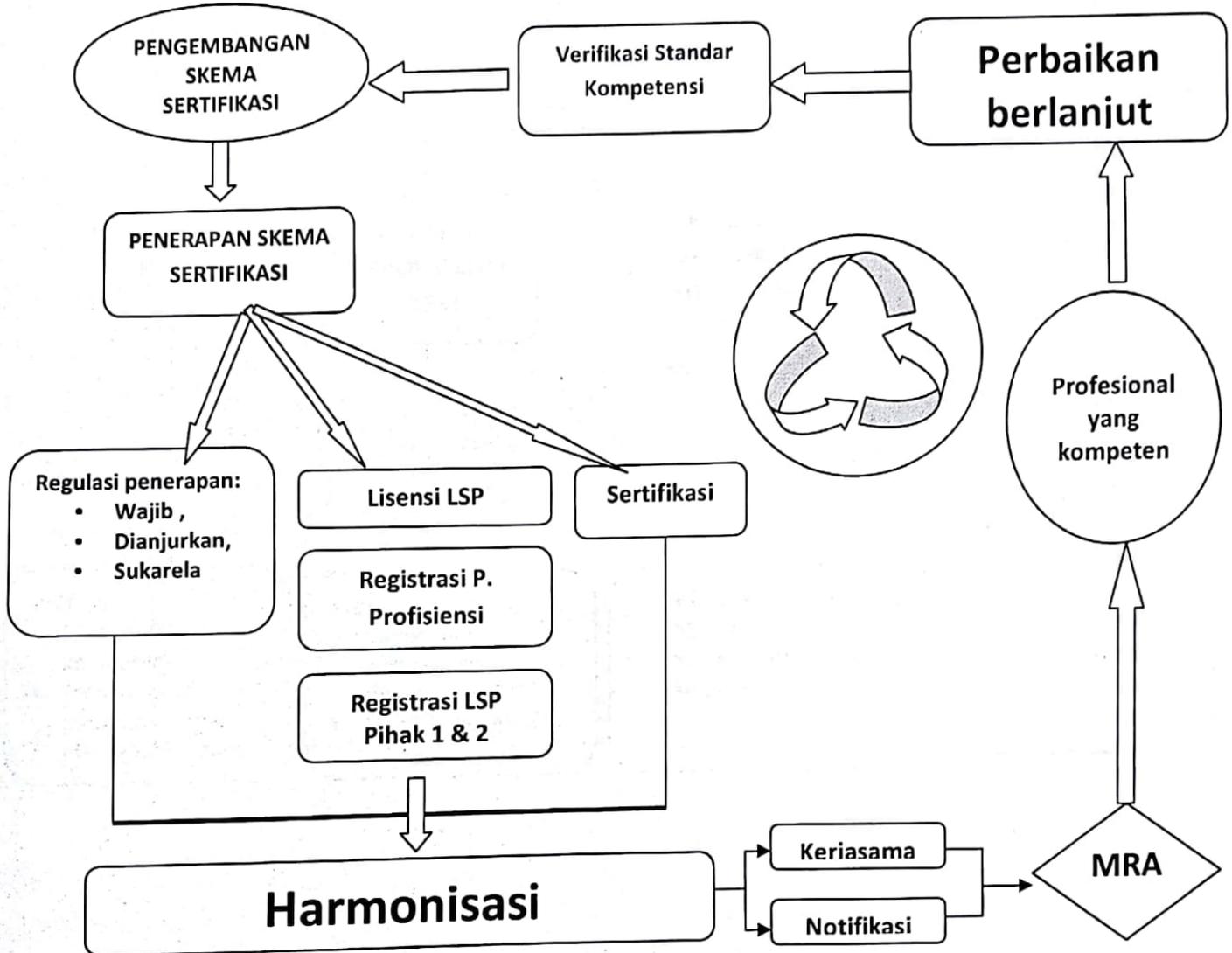
SKEMA KERANGKA FIKIR
OPTIMALISASI BNSP DALAM RANGKA
PERCEPATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI



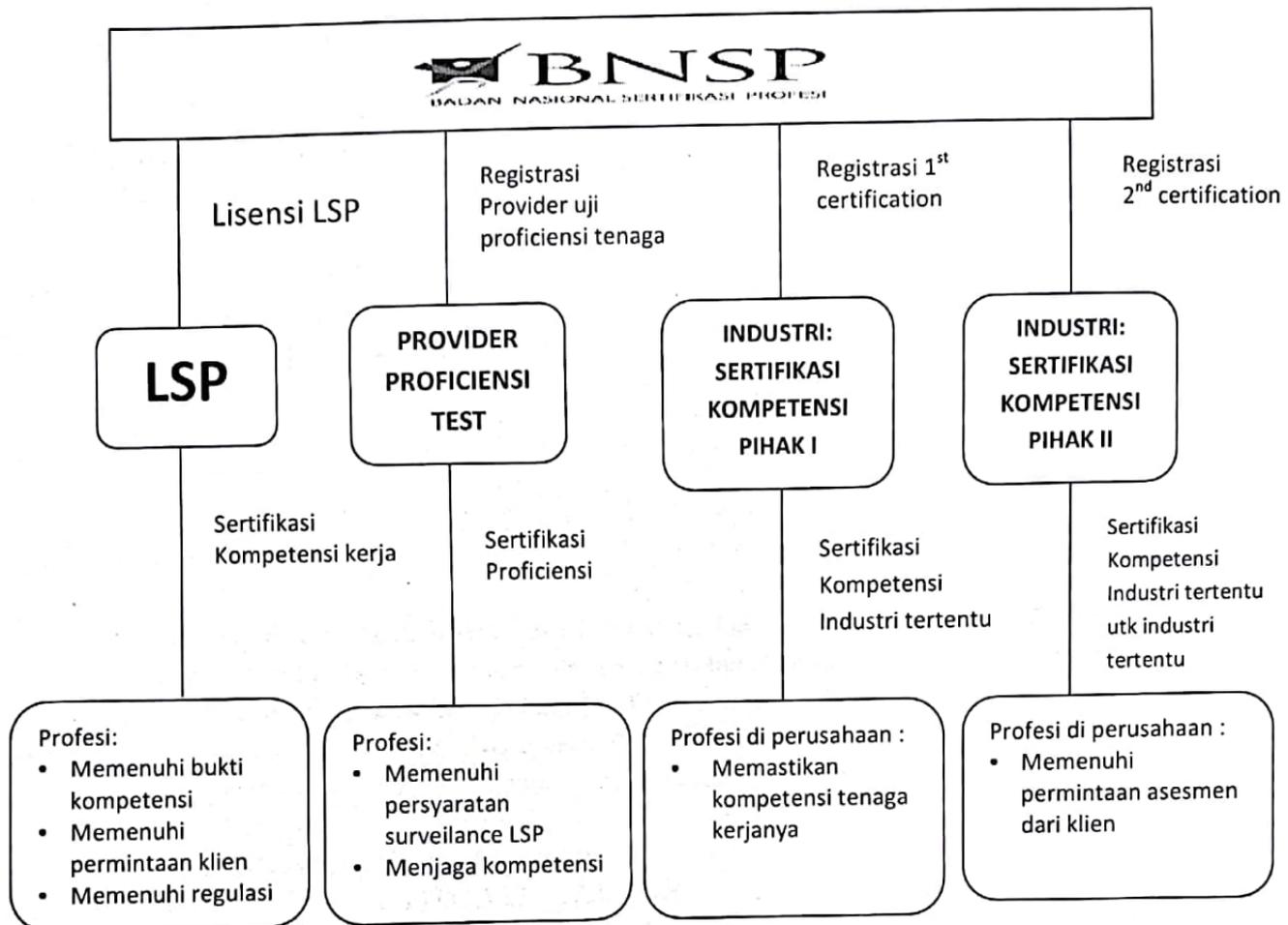
KETELUSURAN DAN KREDIBILITAS PENERAPAN SISTEM SERTIFIKASI



SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI



RUANG LINGKUP SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA





INDONESIAN ASSOCIATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION

Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung
Telp. 022 25102761 · Fax. 022 2500125 · e-mail : iapa.sekretariat@gmail.com

No : 016 /KA-V/11
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Undangan Pembicara KAN-IV
UNHAS - Makassar

Bandung, 23 Mei 2011

Kepada Yth.
Kepala Badan Sertifikasi Nasional – RI
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Konferensi *Indonesian Association for Public Administration IV (IAPA)*, dimana pada acara tersebut akan diadakan seminar dengan tema "*Penguatan Administrasi Publik/ Negara untuk Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik*" maka melalui surat ini kami mengundang Bapak sebagai pembicara pada acara tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juli 2011
Jam : 14.00 WIB – 17.30 WIB
Tempat : Hotel Singgahsana – Makassar
Acara : Terlampir

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, SH., MS

**JADWAL ACARA KONFERENSI ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK (KAN-IV) DAN
SEMINAR NASIONAL PENGUATAN ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT HOTEL SINGGAHSANA, 6 - 8 JULI 2011**

| NO. | HARI/TGL | WAKTU | KEGIATAN | TOPIK | MODERATOR / PENDAMPING | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-----------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|
| 1. | Kamis, 7 Juli 2011 | 08.00 - 12.00 | Penjemputan dan cek in Hotel | | | Seksi Transportasi |
| | | 13.00 - 14.00 14.00 - 17.30 | Pembukaan: • Laporan Panitia • Sambutan Ketua IAPA Pusat (Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, MS,SH) • Pembacaan Doa Pembicara utama: • Dr. Ir. Fadel Muhammad, M.Sc. (Ketua Persadi Pusat) • Kepala Balitbang Kemendiknas (Prof. Dr. H. Mansyur Ramli, MS.) • Badan Sertifikasi Nasional Profesi (Dr. H. A. Daradjat, M.Si.) | Relevansi Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Kebutuhan Dunia Kerja. Kebijakan dan Sinergitas penelitian administrasi public/ negara Standar Pengukuran Sertifikasi Profesi Profesi <i>Removal</i> . | Prof. Deddy T. Tikson, P.Hd | Seksi Acara |
| | | 17.30 - 18.00 18.00 - 19.00 | ISHOMA Penjemputan Peserta menuju Rumah Jabatan Gubernur sebagai tempat pembukaan acara | - | - | Seksi Transportasi |

**JADWAL ACARA KONFERENSI ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK (KAN-IV) DAN
SEMINAR NASIONAL Penguatan Administrasi Negara/Publik
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT HOTEL SINGGAHSANA, 6 - 8 JULI 2011**

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|---------------------|--|-------------|
| | | 19.00 – 22.00 | <ul style="list-style-type: none"> Keynot Speaker Rektor Universitas Hasanuddin (Prof.dr.H. Idrus A. Paturusi) Gubernur Provinsi Sulawesi (Dr.H.Syahrul Yasin Limpo,SH, MH) sekaligus membuka acara konferensi dan seminar nasional IAPA. | Universitas Hasanuddin menuju World Class Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan, | | | Seksi Perencanaan dan Seksi Acara | |
| | | 22.00 | ISTIRAHAT (kembali ke hotel) | | | | | |
| 2. | Jum'at, 8 Juli 2011 | 07.00 – 08.00 | Registrasi Peserta | | | Petugas Pendaftaran | Seksi Pendaftaran dan Seksi Perlengkapan | |
| | | 08.00 – 10.00 | Change Leadership: <ul style="list-style-type: none"> Walikota Makassar Bupati Bualemo Prov. Gorontalo | Makassar menuju Kota Dunia Inovasi Manajemen Pemerintahan | Prof. Dr. Sangkala, MA. | Seksi Acara | | |
| | | 10.00 – 12.00 | <ul style="list-style-type: none"> Bupati Kolaka Prov.Sulawesi Tenggara. Bupati Gowa Prov. Sulawesi Selatan. | Inovasi Manajemen Pemerintahan | Prof.Dr. Suratman Nur., M.Si | | | |
| | | 12.00 – 13.00 | ISHOMA | | | | | |
| | | 13.00 – 18.00 | Sidang Komisi (5 Komisi) | | | | | Seksi Acara |
| | | 18.00 – 19.00 | ISHOMA (registrasi city tour) | | | | | |
| | | 19.00 – 20.00 | Sidang Pleno | | | | Seksi Acara | |
| | | 20.00 – 21.00 | Penutupan: | | | | Seksi Acara | |

**JADWAL ACARA KONFERENSI ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK (KAN-IV) DAN
SEMINAR NASIONAL PENGUATAN ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT HOTEL SINGGAHSANA, 6 - 8 JULI 2011**

| | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Panitia • Sambutan Penutup : • Sekjen IAPA Pusat • Walikota Makassar <p>sekalligus menutup acara konferensi dan seminar nasional IAPA Sulam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembacaan Doa | Inspirator Pembangunan Kota Makassar | | |
| 4. | Sabtu, 9 Juli 2011 | 08.00 - 14.00 | <p>Obyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benteng Rotterdam • Wisata Belanja di Jl. Somba Opu • Benteng Somba Opu • Tran Studio <p>Makan Siang</p> | | | |
| | | 14.00 – 15.00 | Istirahat dan Selesai | | | |

No : 016 /KA-V/11
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Undangan Pembicara KAN-IV
UNHAS - Makassar

Bandung, 23 Mei 2011

Kepada Yth.
Kepala Badan Sertifikasi Nasional – RI
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Konferensi *Indonesian Association for Public Administration IV (IAPA)*, dimana pada acara tersebut akan diadakan seminar dengan tema **“Penguatan Administrasi Publik/ Negara untuk Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik”** maka melalui surat ini kami mengundang Bapak sebagai pembicara pada acara tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juli 2011
Jam : 14.00 WIB – 17.30 WIB
Tempat : Hotel Singgahsana – Makassar
Acara : Terlampir

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, SH., MS

**JADWAL ACARA KONFERENSI ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK (KAN-IV) DAN
SEMINAR NASIONAL PENGUATAN ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT HOTEL SINGGAHSANA, 6 - 8 JULI 2011**

| NO. | HARI/TGL | WAKTU | KEGIATAN | TOPIK | MODERATOR/ PENDAMPING | PENANGGUNG JAWAB |
|---------------|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------------|---------------------|
| 1. | Kamis, 7 Juli 2011 | 08.00 - 12.00 | Penjemputan dan cek in Hotel | | | Seksi Transportasi |
| | | 13.00 - 14.00 | Pembukaan: | | | |
| | | 14.00 - 17.30 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Panitia • Sambutan Ketua IAPA Pusat (Prof.Dr.H. Asep Kartiwa, MS;SH) • Pembacaan Doa <p>Pembicara utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Ir. Fadel Muhammad, M.Sc. (Ketua Persadi Pusat) • Kepala Balitbang Kemendiknas (Prof.Dr.H. Mansyur Ramli, MS.) • Badan Sertifikasi Nasional Profesi (Dr. H. A. Daradjat, M.Si.) | <p>Relevansi Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Kebutuhan Dunia Kerja.</p> <p>Kebijakan dan Sinergitas penelitian administrasi public/negara</p> <p>Standar Pengukuran Sertifikasi Profesi</p> | Prof. Deddy T. Tikson, P.Hd | Seksi Acara |
| 17.30 - 18.00 | ISHOMA | | | | | |
| | | 18.00 - 19.00 | Penjemputan Peserta menuju Rumah Jabatan Gubernur sebagai tempat pembukaan acara | | | Seksi Transportasi |

**JADWAL ACARA KONFERENSI ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK (KAN-IV) DAN
SEMINAR NASIONAL PENGUATAN ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT HOTEL SINGGAHSANA, 6 - 8 JULI 2011**

| | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|------------------------------|---|
| | 19.00 – 22.00 | <p>Keynot Speaker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rektor Universitas Hasanuddin (Prof.dr.H. Idrus A. Paturusi) • Gubernur Provinsi Sulawesi (Dr.H.Syahrul Yasin Limpo,SH, MH) sekaligus membuka acara konferensi dan seminar nasional IAPA. | <p>Universitas Hasanuddin menuju World Class</p> <p>Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan,</p> | - | Seksi Perencanaan dan Seksi Acara |
| | 22.00 | ISTIRAHAT (kembali ke hotel) | - | - | |
| | 07.00 – 08.00 | Registrasi Peserta | - | Petugas Pendaftaran | Seksi Pendaftaran dan Seksi Perencanaan |
| | 08.00 – 10.00 | <p>Change Leadership:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Walikota Makassar • Bupati Bualemo Prov. Gorontalo | <p>Makassar menuju Kota Dunia</p> <p>Inovasi Manajemen Pemerintahan</p> | Prof. Dr. Sangkala, MA. | Seksi Acara |
| 2. | 10.00 – 12.00 | <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Kolaka Prov.Sulawesi Tenggara. • Bupati Gowa Prov. Sulawesi Selatan. | Inovasi Manajemen Pemerintahan | Prof.Dr. Suratman Nur., M.Si | |
| | 12.00 – 13.00 | ISHOMA | | | |
| | 13.00 – 18.00 | Sidang Komisi (5 Komisi) | | | Seksi Acara |
| | 18.00 – 19.00 | ISHOMA (registrasi city tour) | | | |
| | 19.00 – 20.00 | Sidang Pleno | | | |
| 20.00 – 21.00 | Penutupan: | | | | Seksi Acara Seksi Acara |

**JADWAL ACARA KONFERENSI ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK (KAN-IV) DAN
SEMINAR NASIONAL PENGUATAN ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT HOTEL SINGGAHSANA, 6 - 8 JULI 2011**

| | | | | | |
|----|--------------------------|---------------|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Panitia • Sambutan Penutup : <ul style="list-style-type: none"> • Sekjen IAPA Pusat • Walikota Makassar • sekaligus menutup acara konferensi dan seminar nasional IAPA Sulam. • Pembacaan Doa | <p align="center">Inspirator Pembangunan Kota Makassar</p> | |
| 4. | Sabtu, 9 Juli 2011 | 08.00 - 14.00 | <p>Obyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benteng Rotterdam • Wisata Belanja di Jl. Somba Opu • Benteng Somba Opu • Tran Studio <p>Makan Siang</p> | | |
| | | 14.00 – 15.00 | Istirahat dan Selesai | | |